

Pesantren

Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi





Pesantren

Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi

Prof. Dr. Mujamil Qomar, M.Ag





PENERBIT ERLANGGA

JI. H. Baping Raya No. 100 Ciracas, Jakarta 13740 http://www.erlangga.co.id e-mail: editor@erlangga.net (Anggota IKAPI)

Pesantren

Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi

Penulis

Prof. Dr. Mujamil Qomar, M.Ag

Editor

Sayed Mahdi Setya Bhawono

Buku ini diset dan di*layout* oleh bagian produksi *Penerbit Erlangga* Dengan Power Macintosh G4 (AGaramond 12 pt)

Desain Sampul : Achmad Taupik

Percetakan : PT Gelora Aksara Pratama

07 06 3 2

Dilarang keras mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit Erlangga.

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Daftar Isi

KA	TA	PENGANTAR DARI PENULIS	vii	
PES	SAN	TREN. Kata Pengantar oleh Dr. Thoha Hamim	ix	
MU	IKAI	DIMAH	xiii	
١.	EKSISTENSI PESANTREN			
	A.	Terminologi pesantren	1	
	B.	Tujuan pesantren	3	
	C.	Sejarah pesantren	7	
	D.	Kategorisasi dan unsur-unsur pesantren	16	
	E.	Fungsi dan peranan pesantren	22	
V.E	0 <u></u>			
2.	TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN			
	PE:	SANTREN	27	
	A.	Kepemimpinan individual kiai	27	
	B.	Kepemimpinan kolektif yayasan	42	
	C.	Uji coba demokratisasi kepemimpinan	52	
	D.	Pengembangan orientasi pesantren	56	
3.	TP	ANSFORMASI SISTEM PENDIDIKAN		
	PESANTREN			
	A.	Sistem pendidikan independen	61	
	В.	Tantangan-tantangan multidimensional	72	
	C.	Sistem pendidikan adaptif	77	
	D.	Pengaruh sistem pendidikan pesantren terhadap sekolah elit	82	

4.	TRANSFORMASI INSTITUSI DI PESANTREN				
	A.	Langgar/surau dan masjid sebagai kebutuhan			
		dasar	86		
	B.	Asrama atau pondok sebagai penguatan	88		
	C.	Madrasah sebagai pembaharuan	90		
	D.	Sekolah umum sebagai pemantapan pembaharuan	97		
	E.	Perguruan tinggi sebagai penyempurnaan			
		pembaharuan	101		
5.	TRANSFORMASI KURIKULUM PESANTREN		108		
	A.	Materi dasar-dasar keislaman dan ilmu keislaman	109		
	B.	Penambahan dan perincian materi dasar	111		
	C.	Penggunaan kitab-kitab referensi	123		
	D.	Materi pelajaran umum dan ketrampilan	130		
6.	TRANSFORMASI METODE PENDIDIKAN				
	PES	SANTREN	141		
	A.	Metode-metode tradisional	142		
	B.	Metode-metode kombinatif	147		
	C.	Kritik-kritik metodologis	153		
	D.	Respons pesantren terhadap kritik	161		
ко	NKL	.USI	166		
CA	TAT	AN RWUKAN	170		
BIBLIOGRAFII					
TEN	ATL	NG PENLILIS	205		

pernah disentuh oleh proses perubahan yang dinamis bisa dihindari. Seperti diketahui bahwa sebagian pengamat pesantren yang meneliti lembaga ini secara parsial memberikan satu konklusi bahwa lembaga pesantren lahir sebagai perwujudan sikap budaya lokal yang hanya mampu menawarkan bentuk pengajaran yang statis dan tidak dinamis. Berbeda dengan konklusi para pengamat tersebut, penulis buku ini menemukan sebuah dinamika yang halus namun pasti yang terjadi pada institusi pesantren. Dengan karakter seperti itu profile lembaga ini sebetulnya selalu berubah sejak dulu sampai sekarang, baik dari sudut perubahan kepemimpinan, sistem pendidikan, kelembagaan, kurikulum maupun metode pengajarannya. Dinamika seperti itu, menurut Saudara Mujamil Qomar, selalu muncul akibat dari kemampuan pesantren dalam menjalin hubungan interactive dengan nilainilai yang hidup di sekitarnya. Hubungan timbal balik tersebut kemudian melahirkan terjadinya perubahan dan penyesuaian dalam tubuh pesantren, hingga lembaga yang sudah berusia ratusan tahun ini bisa tetap hidup dan menghidupi masyarakat di sekitarnya sampai pada era modern ini.

Penulis buku ini menganalisa perkembangan lembaga pesantren dalam konteks pertumbuhan historisnya. Pesantren, menurut Saudara Mujamil Qomar, selalu peka terhadap bentuk lembaga pendidikan yang hadir di sekitarnya. Karena itu, pesantren sejak fase pertumbuhan sampai kepada bentuknya yang "final" sekarang ini selalu identik dengan model lembaga pendidikan yang saat itu sedang in. Jika lembaga pesantren dalam bentuk embrionya tidak lebih dari sebuah mushalla yang difungsikan sebagai tempat pengajaran ilmu-ilmu dasar agama, pesantren dalam bentuknya sekarang ini adalah lembaga yang kompleks, yang komponennya bisa terdiri dari berbagai unit lembaga pendidikan mulai dari madrasah, sekolah umum sampai perguruan tinggi. Menurut penulis buku ini, proses pembentukan pesantren sebagai lembaga yang berubah-ubah tersebut tidak hanya terjadi sebagai upaya untuk menjajarkan pesantren dengan lembaga pendidikan lain yang berada di tanah air, tetapi juga untuk menyelaraskan dirinya dengan lembaga pendidikan Islam sejenis yang tumbuh dan berkembang di negeri-

mewarnai semua bentuk kegiatan pesantren sehingga menimbulkan perbedaan yang beragam sesuai dengan seleranya masing-masing. Variasi bentuk pendidikan ini juga diakibatkan perbedaan kondisi sosio-kultural masyarakat yang mengelilinginya.

Lantaran variasi tersebut, pesantren mengesankan keunikan tertentu. Keunikan ini memunculkan polemik di kalangan pengamat. Dari sudut esensinya yang dikaitkan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat, Abdurrahman Wahid menilai pesantren sebagai "subkultur" dalam pengertian gejala yang unik dan terpisah dari dunia luar.² Sebaliknya Hadimulyo malah menyebutkan pesantren sebagai "institusi kultural".³ Kuntowijoyo agaknya lebih mendukung penilaian yang kedua ini.⁴ Di sisi lain, banyak pemikir yang mengkritik kualitasnya secara tajam, namun dalam waktu yang bersamaan tidak sedikit pula pemikir yang memujinya.

Perubahan pesantren juga memancing perhatian para peneliti. Mereka memandang dari perspektif yang berlainan sehingga menghasilkan proposisi yang berbeda bahkan kontras. Pandangan mereka secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kubu yang bertentangan. Kontradiksi penilaian merupakan kewajaran bila dihubungkan dengan eksistensi dan format pesantren yang memiliki ciri khas masing-masing.

Survei beberapa ahli membuahkan hasil yang negatif terhadap dinamika pesantren. Menurut survei tersebut, lembaga pendidikan Islam tertua ini tidak lebih dari lambang keterbelakangan. Clifford Geertz yang mengadakan penelitian di Mojokuto, Jawa Timur pada 1955-an menilai bahwa kiai dan pesantrennya sampai tingkat tertentu masih merupakan inti struktur sosial Islam pedesaan dan merupakan puncak kultur kolot. Kehidupannya hanya berkutat pada soal "kuburan" dan "ganjaran". Ahmad Syafi'i Ma'arif memandang hanya sekedar halaqah, suatu tempat para santri mengerumuni seorang kiai, tetapi antara mereka dan pemahaman langsung terhadap Alquran terdapat jarak tertentu. Sedang Fuad Amsyari sangat menyesali eksistensi pesantren salafiyyah yang diyakini membahayakan generasi muda umat dan generasi muda bangsa. Berupakan salafiyyah yang diyakini membahayakan generasi muda umat dan generasi muda bangsa.

xviii Pesantren

di pesantren, transformasi kurikulum pesantren dan transformasi metode pendidikan pesantren. Di samping itu, kajian ini juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi tersebut dan implikasinya.

pandang parsial bukan holistik, sehingga tujuan yang dirumuskan belum merefleksikan realitas sebenarnya atau hanya menunjuk pada rincian yang global. Hiroko Horikoshi melihat dari segi otonominya, maka tujuan pesantren menurutnya adalah untuk melatih para santri memiliki kemampuan mandiri. Sedang Manfred Ziemek tertarik melihat sudut keterpaduan aspek perilaku dan intelektual. "Tujuan pesantren" menurut pengamatannya, "adalah membentuk kepribadian, memantapkan akhlak dan melengkapinya dengan pengetahuan". 10

Hasil wawancara tidak jauh dari asumsi bila kiai pengasuh pesantren yang diwawancarai hanya seorang atau dua orang. Hasil wawancara baru mencerminkan tujuan yang menjangkau berbagai aspek secara komprehensif bila dilakukan terhadap berbagai kiai pengasuh pesantren yang memiliki latar belakang dan visi yang berlainan. Bentuk wawancara yang terakhir ini pernah dialami Mastuhu, kemudian ia merangkum,

Tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat tetapi *rasul*, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad (mengikuti Sunnah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas, dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat di tengah-tengah masyarakat (*'Izz al-Islâm wa al-Muslimîn*) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia.¹¹

Formulasi tujuan menurut Ziemek dan Mastuhu itu hakikatnya sama. Jika Ziemek menyebutkan kepribadian menjadi sasaran yang dicita-citakan, hanya secara garis besar, maka Mastuhu merinci wilayah kepribadian sehingga mengesankan adanya cakupan multidimensional. Kiai Ali Ma'shum menganggap bahwa tujuan pesantren adalah untuk mencetak ulama. Anggapan ini juga yang melekat pada masyarakat sebab pelajaran-pelajaran yang disajikan hampir seluruhnya pelajaran agama, malahan masih ada pesantren tertentu yang menangkal masuknya pelajaran umum. Di samping itu, ulama yang menjadi panutan masyarakat bisa dikatakan seluruhnya lulusan pesantren. Memang

mendirikannya dapat dilacak meskipun ada sedikit perbedaan pemahaman. Di kalangan ahli sejarah terdapat perselisihan pendapat dalam menyebutkan pendiri pesantren pertama kali. Sebagian mereka menyebutkan Syaikh Maulana Malik Ibrahim, yang dikenal dengan Syaikh Maghribi, dari Gujarat, India, sebagai pendiri/pencipta pondok pesantren yang pertama di Jawa. Muh. Said dan Junimar Affan menyebut Sunan Ampel atau Raden Rahmat sebagai pendiri pesantren pertama di Kembang Kuning Surabaya. Bahkan Kiai Machrus Aly menginformasikan bahwa di samping Sunan Ampel (Raden Rahmat) Surabaya, ada ulama yang menganggap Sunan Gunung Jati (Syaikh Syarif Hidayatullah) di Cirebon sebagai pendiri pesantren pertama, sewaktu mengasingkan diri bersama pengikutnya dalam *khalwat*, beribadah secara istiqamah untuk ber-*taqarrub* kepada Allah. Malah.

Data-data historis tentang bentuk institusi, materi, metode maupun secara umum sistem pendidikan pesantren yang dibangun Syaikh Maghribi tersebut sulit ditemukan hingga sekarang. Tidaklah layak untuk segera menerima kebenaran informasi tersebut tanpa verifikasi yang cermat. Namun secara esensial dapat diyakinkan bahwa wali yang berasal dari Gujarat ini memang telah mendirikan pesantren di Jawa sebelum wali lainnya. Pesantren dalam pengertian hakiki, sebagai tempat pengajaran para santri meskipun bentuknya sangat sederhana, telah dirintisnya. Pengajaran tersebut tidak pernah diabaikan oleh penyebar Islam, lebih dari itu kegiatan mengajar santri menjadi bagian terpadu dari misi dakwah Islamiyahnya.

Menurut S.M.N. Al-Attas, Maulana Malik Ibrahim itu oleh kebanyakan ahli sejarah dikenal sebagai penyebar pertama Islam di Jawa yang mengislamkan wilayah-wilayah pesisir utara Jawa, bahkan berkali-kali mencoba menyadarkan raja Hindu-Budha Majapahit, Vikramavardhana (berkuasa 788-833/1386-1429) agar sudi masuk Islam.²² Sementara itu diidentifikasi bahwa pesantren mulai eksis sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara.²³ Akan tetapi mengingat pesantren yang dirintis Maulana Malik Ibrahim itu belum jelas sistemnya, maka keberadaan pesantrennya itu masih dianggap spekulatif dan diragukan.

cerdaskan, meningkatkan kedamaian dan membantu sosio-psikis bagi mereka. Tidak mengherankan jika pesantren kemudian menjadi kebanggaan masyarakat sekitarnya terutama yang telah menjadi Muslim.

Giliran selanjutnya, pesantren berhadapan dengan tindakan tiran kaum kolonial Belanda. Imperialis yang menguasai Indonesia selama tiga setengah abad ini selain menguasai politik, ekonomi, dan militer juga mengemban misi penyebaran agama Kristen. Bagi Belanda, pesantren merupakan antitesis terhadap gerak kristenisasi dan upaya pembodohan masyarakat. Anggapan demikian adalah sebagai basis argumentatif baginya untuk menekan pertumbuhan pesantren. Sutari Imam Barnadib menuturkan bahwa penjajah malah menghalanghalangi perkembangan agama Islam sehingga pondok pesantren tidak dapat berkembang secara normal. Bahkan pada 1882 Belanda membentuk "Pristeranden" yang bertugas mengawasi pengajaran agama di pesantren-pesantren.⁴³ Kurang lebih dua dasawarsa kemudian, dikeluarkan Ordonansi 1905 yang bertugas mengawasi pesantren dan mengatur izin bagi guru-guru agama yang akan mengajar.44 Pada 1925 dikeluarkan aturan yang membatasi pada lingkaran kiai tertentu yang boleh memberikan pelajaran mengaji.45 Pada 1932 keluar lagi aturan yang terkenal dengan Ordonansi Sekolah Liar (Widle School Ordonantie) yang berupaya memberantas serta menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberi pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah.46 Secara kuantitatif peraturan yang membelenggu perkembangan pesantren bukan hanya dua kali (1905 dan 1925) sebagaimana kesimpulan G.F. Pijper,⁴⁷ melainkan minimal empat kali yaitu pada 1882, 1905, 1925 dan 1932. Belum lagi aturan-aturan yang tidak formal seperti pencekalan terhadap kitab-kitab yang mampu mendinamisasikan pemikiran dan tindakan kaum santri. Fahruddin mendata kitab tersebut meliputi Risalah Tauhid, dan Tafsir al-Manar dari Syaikh Muhammad 'Abduh, Tafsir al-Jawahir dan al-Qur'an wa al-'Ulum al-'Ashriyyah dari Syaikh Thanthawi Jauhari, al-Islam Ruh al-Madaniyah dan 'Izhat al-Nâsyi'în oleh Musthafa al-Ghalayain. 48 Padahal kitabkitab tersebut tidak memuat kaidah-kaidah politik, melainkan sekedar ada kandungan seruan moral untuk bersikap dinamis.

hadapi dunia modern, masuknya semua informasi dari luar akan mengurangi peran kiai. Namun, keadaan ini tidak akan terjadi di Indonesia, karena kiai senantiasa menyeleksi informasi yang masuk. Informasi yang baik, masyarakat disuruh memakai, dan sebaliknya informasi yang jelek, rakyat disuruh melupakannya.⁶³

Kategorisasi dan Unsur-unsur Pesantren

Pesantren adalah merupakan hasil usaha mandiri kiai yang dibantu santri dan masyarakat, sehingga memiliki berbagai bentuk. Selama ini belum pernah terjadi, dan barangkali cukup sulit terjadi penyeragaman pesantren dalam skala nasional. Setiap pesantren memiliki ciri khusus akibat perbedaan selera kiai dan keadaan sosial budaya maupun sosial geografis yang mengelilinginya.

Variasi pesantren tersebut perlu diadakan pembedaan secara kategorial. Kategori pesantren bisa diteropong dari berbagai perspektif; dari segi rangkaian kurikulum, tingkat kemajuan dan kemodernan, keterbukaan terhadap perubahan, dan dari sudut sistem pendidikannya. Dari segi kurikulumnya, Arifin menggolongkannya menjadi pesantren modern, pesantren tahassus (tahassus ilmu alat, ilmu fiqh/ushul fiqh, ilmu tafsir/hadits, ilmu tasawuf/thariqat, dan qira'at al-Qur'an) dan pesantren campuran.⁶⁴ Dipandang dari kemajuan berdasarkan muatan kurikulumnya, Martin Van Bruinessen mengelompokkan pesantren menjadi pesantren paling sederhana yang hanya mengajarkan cara membaca huruf Arab dan menghafal beberapa bagian atau seluruh al-Qur'an, pesantren sedang yang mengajarkan berbagai kitab fiqh, ilmu aqidah, tata bahasa Arab (nahwu sharaf), terkadang amalan sufi, dan pesantren paling maju yang mengajarkan kitab-kitab fiqh, aqidah, dan tasawuf yang lebih mendalam dan beberapa mata pelajaran tradisional lainnya.65

Dhofier memandang dari perspektif keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian membagi pesantren menjadi dua kategori yaitu pesantren salafi dan khalafi. Pesantren salafi tetap mengajarkan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikannya. Penerapan sistem madrasah untuk memudahkan

pengajian.⁷⁴ Ada yang tidak menyebut unsur pengajian, tetapi menggantinya dengan unsur ruang belajar, aula atau bangunan-bangunan lain.⁷⁵

Kiai di samping pendidik dan pengajar, juga pemegang kendali manajerial pesantren. Bentuk pesantren yang bermacam-macam adalah pantulan dari kecenderungan kiai. Kiai memiliki sebutan yang berbedabeda tergantung daerah tempat tinggalnya. Ali Maschan Moesa mencatat: di Jawa disebut Kiai, di sunda disebut Ajengan, di Aceh disebut Tengku, di Sumatera Utara/Tapanuli disebut Syaikh, di Minangkabau disebut Buya, di Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah disebut Tuan Guru. Mereka semua juga bisa disebut ulama sebagai sebutan yang lebih umum (menasional), meskipun pemahaman ulama mengalami pergeseran.

Kiai disebut alim bila ia benar-benar memahami, mengamalkan dan memfatwakan kitab kuning. Kiai demikian ini menjadi panutan bagi santri pesantren, bahkan bagi masyarakat Islam secara luas.⁷⁷ Akan tetapi dalam konteks kelangsungan pesantren kiai dapat dilihat dari perspektif lainnya. Muhammad Tholchah Hasan melihat kiai dari empat sisi yakni kepemimpinan ilmiah, spiritualitas, sosial, dan administrasinya.⁷⁸ Jadi ada beberapa kemampuan yang mestinya terpadu pada pribadi kiai dalam kapasitasnya sebagai pengasuh dan pembimbing santri.

Santri merupakan peserta didik atau objek pendidikan, tetapi di beberapa pesantren, santri yang memiliki kelebihan potensi intelektual (santri senior) sekaligus merangkap tugas mengajar santri-santri yunior. Santri ini memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu. "Santri memberikan penghormatan yang terkadang berlebihan kepada kiainya". Kebiasaan ini menjadikan santri bersikap sangat pasif karena khawatir kehilangan barokah. Kekhawatiran ini menjadi salah satu sikap yang khas pada santri dan cukup membedakan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh siswa-siswi sekolah maupun siswa-siswi lembaga kursus.

Akan tetapi belakangan ini ada perkembangan baru di kalangan santri. Hasan melukiskan bahwa kalau dulu semangat *rûh al-inqiyât*

hidupnya pada perjuangan pesantren. Di pondok, kiai sebagai pendidik dan pengajar, tetapi di medan pertempuran sebagai komandan. Dia bukan sekadar membekali secara fisik, melainkan juga membangun kekuatan spiritual. Ilmu-ilmu *kasekten* mendapat perhatian meluas pada saat perjuangan itu sebagai bekal melawan musuh yang lebih lengkap peralatan perangnya.

Santri di pondok sebagai siswa, ketika di medan peperangan berubah menjadi prajurit-prajurit yang patriotik. Pekik-pekik heroik justru dikumandangkan dari pesantren. Demikian pula perlawananperlawanan terbuka. Warga pesantren jatuh-bangun berlumuran darah menghadapi pertumpuran secara maraton. Berbagai peperangan diikuti secara aktif, bahkan kiai memobilisasi massa. Catatan Saridjo dkk. menunjukkan betapa besar andil pesantren dalam mengusir penjajah di Indonesia. Dimulai oleh Pangeran Sabrang Lor (Patih Unus), Trenggono, Fatahillah (zaman Kerajaan Demak) yang berjuang mengusir Portugis (abad ke-15), kemudian masa Cik Ditiro, Imam Bonjol, Hasanuddin, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro dan lain-lain sampai masa revolusi fisik 1945.95 Sartono Kartodirdjo hampir memastikan semua peperangan melawan Belanda pada abad ke-19 dimobilisasi atau setidaknya didukung pesantren. Perang-perang besar seperti perang Diponegoro, perang Paderi, perang Banjar, sampai perlawanan-perlawanan lokal yang meledak di berbagai daerah dikendalikan oleh tokoh-tokoh atau alumni pesantren.96

Tidak terlalu jauh berbeda dengan Belanda, terhadap Jepang pun pesantren merapatkan barisan untuk mengadakan perlawanan. Harry J. Benda menyebutkan bahwa KH. Zaenal Musthofa dari pesantren Sukamanah, Tasikmalaya, memimpin pemberontakan terhadap pemerintah Jepang pada 1944.⁹⁷ Hanya saja tidak sestrategis terhadap Belanda sebab akhirnya Jepang tidak banyak mengganggu pesantren.

Pada waktu berkobarnya pertempuran pada 10 Nopember 1945, santri-santri pesantren bergerak melawan Inggris dan Belanda di Surabaya dengan mengalungkan kain sarung mereka dan bersenjata bambu runcing.⁹⁸

Pesantren berupaya menumpas segala bentuk dan unsur penjajahan

Dahulu orang memandang seseorang yang pandai di bidang agama Islam baru layak disebut kiai bila ia mengasuh atau memimpin pesantren. Sekarang, meskipun tidak memimpin pesantren, bila ia memiliki keunggulan dalam menguasai ajaran-ajaran Islam dan amalan-amalan ibadah sehingga memiliki pengaruh yang besar di masyarakat, sering juga disebut kiai seperti Kiai Ali Yafie, kiai Abdul Muchith Muzadi, kiai Yasin Yusuf dan kiai Zainuddin MZ. Hanya saja berkaitan dengan wacana politik pendidikan pesantren yang senantiasa dikendalikan kiai, maka pemakaian istilah kiai dalam konteks ini lebih mengacu pada pemahaman lama yakni kiai sebagai pemimpin pesantren, tetapi bukan hanya mengajarkan kitab-kitab Islam klasik semata seperti pemahaman awal tersebut, melainkan juga meliputi pengajaran kitab-kitab modern atau kontemporer.

Pemakaian istilah kiai tampaknya merujuk pada kebiasaan daerah. Pemimpin pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah disebut kiai, sedang di Jawa Barat digelari ajengan. Secara nasional, term kiai lebih terkenal daripada ajengan. Paralel dengan kiai adalah ulama, yang merupakan istilah yang ditransfer dari dua sumber skriptural Al-Qur'an dan al-Sunnah serta digunakan secara nasional. Kiai dan ulama berbeda asal usul bahasanya, tetapi memiliki esensi kualitas yang relatif sama. Keduanya memiliki karakter fundamental yang berkualitas tinggi dalam hal iman, takwa, dan ilmu sebagai ciri khas.

Gelar kiai tidak diusahakan melalui jalur-jalur formal sebagai sarjana misalnya, melainkan datang dari masyarakat yang secara tulus memberikannya tanpa intervensi pengaruh-pengaruh pihak luar. Kehadiran gelar ini akibat kelebihan-kelebihan ilmu dan amal yang tidak dimiliki lazimnya orang, dan kebanyakan didukung pesantren yang dipimpinnya. Oleh karena itu kiai menjadi patron bagi masyarakat sekitar terutama yang menyangkut kepribadian utama. Sebagai patron, "kiai" dalam pandangan Martin Van Bruinessen, "memainkan peranan yang lebih dari sekedar seorang guru". Ja bukan sekadar menempatkan dirinya sebagai pengajar dan pendidik santri-santrinya, melainkan juga aktif memecahkan masalah-masalah krusial yang dihadapi masyarakat. Ia memimpin kaum santri, memberikan pem-

tangan dari santri dengan "sejumlah harapan berkah" kepada kiai betapapun tidak bisa begitu saja dipisahkan dari budaya feodalisme yang tumbuh subur di kalangan istana kerajaan. Akhirnya tradisi feodalisme terasa sulit dihapus di dalam pesantren sendiri.

Segala bentuk kebijaksanaan pendidikan baik menyangkut format kelembagaan berikut penjenjangannya, kurikulum yang dipakai acuan, metode pengajaran dan pendidikan yang diterapkan, keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas di luar, penerimaan santri baru, maupun secara global sistem pendidikan yang diikuti adalah wewenang mutlak kiai. Berkaitan dengan penentuan *policy* pendidikan, pengajaran, lebih-lebih menyangkut aspek manajerial, pihak lain hanyalah sebagai pelengkap. Sindu Galba menyimpulkan, "Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren".¹³

Kekuasan mutlak itu pada gilirannya menyuburkan variasi pesantren. Berbagai bentuk dan corak pesantren merupakan akibat dari kebijaksanaan kiai yang berbeda-beda dan tidak pernah diseragamkan. Kemampuan dasar dan kapasitas kiai senantiasa mewarnai karakter pesantren. Kecakapan, kemampuan, dan kecondongan kiai dapat dibaca pada corak pendidikan di pesantren yang didirikan atau diasuhnya. Dengan mengamati corak pesantren kita akan mampu menterjemahkan pribadi kiainya khususnya yang terkait dengan keahlian dan seleranya. Peneliti seperti Marwan Saridjo dkk., Zamakhsyari Dhofier, dan Manfred Ziemek menemukan data bahwa perluasan pengajian dan penentuan corak pengetahuan yang diberikan di pesantren itu sangat bergantung pada keadaan, kecakapan, dan keahlian kiainya. 14

Oleh karena itu, ditemukan spesialisasi yang berlainan di kalangan pesantren. Dahulu, banyak santri yang menjadi musafir pemburu ilmu dengan cara berpindah dari satu pesantren menuju pesantren lainnya yang memiliki corak keilmuan yang berbeda. Mereka mengejar spesialisasi masing-masing pelajaran dari kiai yang benar-benar ahli. Tujuannya ingin mendalami berbagai mata pelajaran secara seimbang. Spesialisasi pesantren tersebut merupakan gambaran spesialisasi kiainya. Geertz melaporkan, "Berbagai kiai memiliki spesialisasi yang berbeda". ¹⁵ Kiai-kiai pesantren Tremas Pacitan terkenal ahli bahasa Arab, KH.

Berkat orientasi baru tersebut pesantren tidak lagi terlalu mengesankan 'uzlah (mengasingkan diri), melainkan berusaha mengimbangi institusi-institusi pendidikan lainnya dengan tidak meninggalkan identitasnya yang prinsipil. Masuknya pengetahuan umum dan berbagai ketrampilan adalah wujud upaya perimbangan itu. Langkah tersebut merupakan orientasi baru bagi pesantren di lihat dari strategi manajemennya. Mastuhu menerangkan bahwa dalam hal strategi atau bentuk penyelenggaraan pendidikan, dulu pesantren 'uzlah dari sistem pendidikan pemerintah kolonial. Sekarang tidak hanya mau duduk bersanding dengan sistem pendidikan nasional, bahkan mulai masuk ke dalam sistem pendidikan nasional itu.⁸⁹

Mayoritas pesantren modern yang mengalami perubahan orientasi tersebut masih juga mempertahankan tradisi lama seperti kajian terhadap kitab-kitab Islam klasik. Bahkan pesantren yang dimodernisasi ini masih tetap mempertahankan misinya yang mendasar sebagai pembentukan pribadi utama atau penyempurnaan iman-takwa. Corak pesantren bisa bervariasi, tetapi satu hal yang tidak pernah diabaikannya yaitu pelaksanaan pendidikan yang mengarah pada pembentukan manusia yang iman-takwa. Hakikatnya justru keimanan dan ketakwa-an inilah intinya sedang berbagai tekanan hanya sekadar penampilan luar.

Jadi pesantren modern telah merubah orientasi dengan menyerap unsur-unsur baru yang dipandang penting, tetapi masih juga mempertahankan tradisinya yang lama. Hal ini menunjukkan telah terjadi pengembangan orientasi. Kebijaksanaan pesantren ini paralel dengan kondisi umat Islam secara keseluruhan dalam menghadapi modernisasi. Arus modernisasi di dunia Islam tidak berhasil melunturkan tradisireligius umatnya. Dengan cermat John L. Esposito menilai, "Suatu asumsi umum dalam teori pembangunan adalah bahwa modernisasi memperlemah tradisi keagamaan karena modernisasi membantu proses sekularisasi. Kenyataan di banyak negeri Muslim menyangkal dugaan latah ini". Pesantren modern juga bersikap demikian. Pesantren modern berupaya mengadakan adaptasi terhadap sistem pendidikan nasional dan Barat, namun didampingi kendali yang kuat sehingga

atau penambahan tokoh-tokoh pemeran dan isi-isi pesannya diarahkan mengemban misi Islam.

Bagi para penyiar Islam, wadah sesuatu budaya bisa diadaptasi selama masih dipandang positif. Namun, persoalan isi menjadi perhatian utama yang tidak boleh mengalami adaptasi maupun kompromi dengan isi ajaran agama lainnya, terutama ketika konsepnya bertentangan. Strategi ini bisa berfungsi menjaga kesinambungan tradisi yang berkembang di masyarakat mengingat pendekatan dalam berdakwah yang ditempuh mereka adalah pendekatan adaptif-selektif, bukan konfrontatif. Hal-hal yang baik masih perlu dipertahankan sedangkan yang jelek dihapuskan selanjutnya digantikan sesuatu yang baru yang baik.

Proses adaptasi sistem pendidikan pesantren itulah yang menguatkan penilaian selama ini bahwa pendidikan pesantren disebut sistem pendidikan produk Indonesia. Nurcholish Madjid menyebut dengan istilah *indegenous* (pendidikan asli Indonesia).⁴ Sistem pendidikan asli Indonesia ini pernah menganut dan memiliki daya tawar yang tinggi sebagai antitesis terhadap sistem pendidikan Belanda. Karel A. Steenbrink mengungkapkan bahwa pada 1930-an, sistem pesantren yang sering disebut sistem pendidikan asli Indonesia dapat menyaingi pendidikan Barat yang materialis dan bertujuan mempersiapkan tenaga untuk fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dan untuk mencari uang.⁵

Pada perkembangan berikutnya, sentimen politik dan sentimen agama dari kalangan Muslim Indonesia turut serta mengokohkan sikap resistensi yang begitu kuat terhadap sistem pendidikan yang ditawarkan Belanda. Sebagaimana telah menjadi pemahaman bersama bahwa Belanda datang ke Indonesia adalah untuk kepentingan penjajahan dan penyebaran agama Kristen. Bisa dibayangkan implikasi berikutnya, kalangan Muslim adalah merupakan lapisan masyarakat yang paling dirugikan. Mereka tertekan secara politis dan secara religius. Akibatnya mereka menolak segala sesuatu yang berbau Belanda termasuk sistem pendidikan yang ditawarkannya.

Bersamaan dengan munculnya sentimen politik dan religius tersebut, timbulnya faktor sosio-ekonomik juga berperan memperkuat

kebijakan dan melakukan pilihan-pilihan. Sistem pendidikan pesantren dengan demikian sangat bergantung pada selera kiainya. Keahlian dan pengalaman kiai tentu saja turut mewarnai sistem pendidikan pesantren yang diasuhnya. Tidak sedikit spesialisasi pengkajian di pesantren disesuaikan dengan spesialisasi keilmuan yang dimiliki kiainya. Pilihan ini masih dalam batas kewajaran atau keniscayaan, yang menarik justru sikap independen kiai dalam menentukan corak sistem pendidikan pesantrennya.

Oleh karena itu, sistem pendidikan pesantren masih belum memiliki kesamaan dasar di luar penggunaan buku-buku wajib (*kutub almuqarrarah*). Keragaman ini timbul karena ketidaksamaan dalam sistem pendidikannya; ada pesantren yang menyelenggarakan pengajian tanpa sekolah/madrasah, ada pesantren yang hanya menggunakan sistem pendidikan madrasah secara klasikal, dan ada pula pesantren yang menggabungkan sistem pengajian dan sistem madrasah secara non klasikal. Pada sistem madrasah non klasikal ini, materi pelajaran diberikan secara berurutan dari kitab-kitab lama yang sudah umum dipakai dalam pengajian. Maka tidak mungkin ada penyatuan kurikulum pesantren selama masih ada perbedaan-perbedaan cukup besar dalam sistem pendidikan yang dianut.¹⁷

Dengan pengertian lain, pesantren mempunyai karakter plural, tidak seragam, dan tidak memiliki wajah tunggal (uniform). Pluralitas pesantren ditunjukkan antara lain oleh tiadanya sebuah aturan pun baik menyangkut manajerial, administrasi, birokrasi, struktur, budaya, kurikulum apalagi pemihakan politik —yang dapat mendefinisikan pesantren menjadi tunggal, kecuali aturan itu datang dari pemahaman agama yang terefleksikan dalam berbagai kitab kuning (al-kutub al-shafrâ' atau al-kutub al-qadîmah).¹⁸

Kuatnya independensi tersebut menyebabkan pesantren memiliki kebebasan relatif yang tidak harus mengikuti model baku yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan. Pesantren bebas mengembangkan model pendidikannya tanpa harus mengikuti standarisasi dan kurikulum yang ketat. Pesantren selalu memberikan kebebasan dalam menentukan pola kebijakan pendidikannya. Setiap

Pandangan bahwa ilmu adalah sesuatu yang suci akan sangat membahayakan karena akan mengarah pada pensakralan pemikiran keagamaan (taqdîs al-afkâr al-dîniy). Kita tahu bahwa bangunan ilmu adalah kontribusi dari hasil pemikiran akal seseorang dan berdasarkan data-data empirik. Sementara itu, pemikiran rasional seseorang—betapapun jeniusnya— senantiasa mengalami keterbatasan-keterbatasan. Lagi pula bisa saja muncul pandangan yang bertentangan dari dua orang ahli meskipun membahas objek yang sama karena berbeda sudut pandangnya. Ketika hasil pemikiran keagamaan tertentu dianggap sakral maka akan menjadi problem yang serius. Santri akan mengalami keterjebakan jika masih mensucikan ilmu.

Pada bagian lain, "secara tradisional sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren memilahkan secara tegas aspek pengembangan intelektual dan aspek pembinaan kepribadian". Sistem pendidikan pesantren lebih mengutamakan pembinaan kepribadian daripada pengembangan intelektual, sehingga daya kritis, tradisi kritik, semangat meneliti, dan kepedulian menawarkan sebuah konsep keilmuan tidak muncul dari pesantren. Dengan kata lain, perhatian pesantren lebih tertuju pada pendidikan daripada pengajaran, padahal kedua hal itu seharusnya diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis.

Penekanan pada pendidikan ini terlihat pada model pengajarannya. Pengajaran agama dengan menggunakan kitab-kitab *muqarrarah* mempergunakan sistem pengajian non klasikal, dengan urutan membaca, menterjemahkan dengan memperhatikan kedudukan tiap kata dalam kalimat. Sistem demikian ini disebut *Grammatical Translation Approach*. Melalui sistem semacam ini, hampir tidak mungkin untuk mengembangkan dan mendorong terciptanya suatu pikiran yang mandiri, merdeka dan kritis dalam diri seorang santri. Dalam kenyataannya lingkungan belajar pesantren tidaklah mendorong orang untuk berijtihad". Bahkan gagasan perlunya ijtihad menjadi bahan tertawaan di pesantren karena kalangan pesantren hanya memaknai ijtihad dalam konteks ijtihad mutlak seperti dilakukan Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan pendiri mazhab lainnya.

bisa menutup diri dari perubahan sosial yang sangat cepat. Nilai-nilai modern sebagai *snow balling* efek industrialisasi, mulai mempengaruhi nilai-nilai budaya pesantren. ⁴⁰ Realitas ini memang terasa sebagai suatu dilema yang tidak mudah dipecahkan bagi pesantren.

Pada realitas lainnya, perkembangan pesantren di masa depan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengantisipasi dan mengatasi kesulitan, tantangan dan dilema yang selama ini menyelimutinya. Pesantren yang mampu merespons minimal tidak akan termarjinalkan oleh desakan-desakan pengaruh global. Pesantren dengan demikian sepatutnya menempuh strategi adaptif-selektif. Artinya, pesantren perlu mengadakan pembaharuan yang bisa mengimbangi kemajuan zaman tetapi materi pembaharuannya harus terlebih dahulu diseleksi secara ketat berdasarkan parameter ajaran-ajaran Islam.

Pesantren dituntut mampu merumuskan konsep pengembangan ajaran Islam sebagai tatanan sosial, bukan hanya lembaga legalistik yang bersifat hitam-putih. Untuk mempermudah pesantren menjalankan peranannya dibutuhkan kemampuan antisipatif dan keterbukaan. Keterbukaan akan menumbuhkan sikap lentur (fleksibel) yang akomodatif.⁴² Bentuk dari keterbukaan ini berupa pesantren dengan tulus ikhlas bersedia menerima masukan-masukan positif, konstruktif, dan inovatif yang berasal dari mana pun termasuk sejumlah ahli dari luar pesantren. Kemudian pesantren juga harus bersedia mengakui serta mengoreksi kelemahan-kelemahan yang menimpanya, untuk dicarikan solusinya.

Di samping itu, pesantren dituntut bersikap kreatif dalam mengelola dirinya. Dalam merespons tuntutan pendidikan, pesantren bisa melakukan improvisasi dan inovasi tanpa mengubah watak dan karakteristik tradisional.⁴³ Namun, hingga kini pesantren belum melakukan eksplorasi pemikiran untuk pengembangan mutu yang diharapkan.⁴⁴ Padahal, pendidikan kita membutuhkan pemikiran dan langkahlangkah transformatif.⁴⁵

Langkah transformatif yang dimaksudkan adalah langkah-langkah yang tidak sekadar merubah bentuk dari aslinya menjadi bentuk yang baru, tetapi yang lebih penting justru terletak pada nilai-nilai positif-

1934, atas usul A. Wahid Hasyim.²⁶ Di samping kesamaan nama kedua madrasah tersebut, juga terdapat kesamaan model pembaharuannya.

Akan tetapi ada satu hal yang perlu mendapat perhatian bahwa apakah madrasah Nizhamiyyah yang dibangun oleh Nizham al-Mulk itu tingkatannya sama dengan madrasah di pesantren itu? Tampaknya madrasah Nizhamiyah ini lebih tinggi (setingkat perguruan tinggi) daripada madrasah di pesantren, terbuktikan Imam al-Ghazali sempat menjadi guru besar pada lembaga tersebut. Oleh karena itu, sistem pendidikannya sangat mapan.

Perbedaan lainnya adalah madrasah Nizhamiyyah, selain sebagai lembaga untuk mengajarkan *fiqh* guna mengembangkan ajaran *Sunni*, juga dimaksudkan untuk menyiapkan pegawai pemerintah, terutama di lapangan hukum dan pengadilan.²⁷ Sedangkan madrasah di pesantren sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga kerja dan birokrat kolonial. Bahkan para pendirinya bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda.²⁸ Motif pendirian madrasah lebih karena kepentingan respons terhadap pendidikan kolonial Belanda itu.

Selanjutnya, gelombang pembaharuan yang dilancarkan Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan lain-lain juga mempengaruhi ulama-ulama pesantren pada abad ke-20. Mayoritas mereka adalah lulusan-lulusan Timur Tengah yang pernah menyerap langsung pikiran-pikiran modernis dari para pembaharu ini terutama Abduh, sehingga di samping membangunkan kesadaran untuk mendirikan organisasi-organisasi sosial keagamaan juga merubah sistem pendidikan. M. Yacub menyatakan bahwa dengan tampilnya para pembaharu di kalangan ulama Islam tersebut, sistem pendidikan dalam pesantren juga mengalami perubahan dengan cara memodernisasi madrasahnya.²⁹

Maka kesimpulan Sumarsono Mestoko dkk. bahwa institusi madrasah dipengaruhi madrasah Dar al-'Ulum dan Shaulatiyyah di Mekah, serta sistem Barat seperti HIS, MULO, dan AMS pada zaman penjajahan Belanda,³⁰ masih perlu disempurnakan. Sebenarnya lembaga

Tasawuf pada awal pertumbuhan pesantren memiliki kedudukan yang kokoh karena ditopang kondisi sosio-psikis serta sosio-religius masyarakat waktu itu, yang membutuhkan kehadiran Islam yang bercorak sufistik. Tekanan perhatian pada tasawuf di lain pihak juga telah berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang. Hasil penelitian para ahli menjadi pertimbangan yang cukup penting dalam mengabsahkan kedudukan tasawuf tersebut. Azyumardi Azra misalnya, dia melaporkan bahwa dalam abad ke-18 pesantren dan sejenisnya (meunasah di Aceh dan surau di Minangkabau dan Semenanjung Malaya) mulai mapan meskipun sebagai kubu-kubu terkuat tasawuf.9 Demikian juga menurut Mustofa Syarif et al. bahwa akibat pengaruh dari *zawiyah* yang didirikan kaum *sufi*, maka tidaklah mengherankan jika sejak dahulu hingga sekarang, tasawuf masih merupakan warna dasar kehidupan pondok pesantren, terutama pesantren yang tua-tua.¹⁰

Sehubungan dengan itu, cukup dapat dipahami jika kondisi pendidikan pesantren diorientasikan pada ibadah kepada Allah dan serangkaian amalan yang mendukungnya. Sebaliknya pemikiran-pemikiran strategis tidak muncul dalam pesantren ini kendati berupa terobosan-terobosan untuk memajukan pesantren itu sendiri untuk bisa memodifikasi dan mengadakan pembaharuan-pembaharuan.

Penambahan dan Perincian Materi Dasar

Dalam abad ke-19, sulit ditemukan rincian materi pelajaran di pesantren, namun ada sedikit petunjuk secara implisit dari hasil penelitian L.W.C. Van den Berg sebagaimana yang dikutip Steenbrink bahwa materi tersebut meliputi fiqih, tata bahasa Arab, *ushul al-Din*, tasawuf, dan tafsir.¹¹

Kemudian kurikulum pesantren berkembang menjadi bertambah luas lagi dengan penambahan ilmu-ilmu yang masih merupakan elemen dari materi pelajaran yang diajarkan pada masa awal pertumbuhannya. Pengembangan kurikulum tersebut lebih bersifat rincian materi pelajaran yang sudah ada daripada penambahan disiplin ilmu yang baru sama sekali. Beberapa laporan mengenai materi pelajaran tersebut dapat disimpulkan: al-Qur'an dengan tajwid dan tafsirnya, aqaid dan

perkembangan yang sekarang ini. Anggapan tersebut timbul sebagai reaksi dari hasil perkenalan intelektual antara perintis (kiai) pesantren dengan pendidikan agama yang berlangsung di Mekah dan al-Azhar, baik melalui ibadah haji maupun keperluan mencari ilmu. di samping itu Mekah dianggap memiliki suatu keistimewaan sebagai kota kelahiran Islam (kota suci).

Oleh karena itu, dari perspektif metodologis, pengajaran model wetonan di pesantren merupakan dampak jaringan intelektual dalam skala internasional. Hasil pengamatan Said dan Affan membuktikan bahwa metode ini dari dulu sampai sekarang masih dipakai oleh ustadzustadz di masjid Al-Haram di Mekah dan di masjid al-Azhar di Kairo.⁵ Wetonan di masjid Al-Haram sekarang ini dalam bentuk pengajianpengajian tentang materi yang berbeda-beda dan disampaikan oleh kiai yang berlainan, tetapi dalam waktu yang sama. Pusat perhatian peserta pengajian di masjid Al-Haram senantiasa tertuju pada materi pelajaran dan sosok kiai yang mengajarkannya. Namun materi mantiq, filsafat, dan tasawuf menjadi materi pengajian yang dilarang pemerintah Saudi Arabia sebagai penganut Wahabiy. Larangan sekeras ini tidak berlaku di masjid al-Azhar. Suasana pendidikan di masjid Al-Azhar ini lebih liberal daripada di masjid Al-Haram. Hanya saja pengaruh pola pengajaran di masjid Al-Haram lebih besar dibanding dengan pengaruh masjid al-Azhar terhadap pesantren, lantaran kiai pendiri atau pengasuh pesantren lebih banyak yang lulusan Mekah dibanding lulusan Mesir.

Metode sorogan dan wetonan sama-sama memiliki ciri pemahaman yang sangat kuat pada pemahaman tekstual atau literal.⁶ Bersamaan dengan penggunaan metode ini berkembang pula tradisi hafalan. Bahkan di pesantren, keilmuan hanya dianggap sah dan kokoh bila dilakukan melalui transmisi dan 'hafalan', baru kemudian menjadi keniscayaan. Lebih jauh lagi, parameter kealiman seseorang dinilai berdasarkan kemampuannya menghafal teks-teks.⁷ Dengan begitu, tidak mengherankan jika lulusan pesantren menunjukkan profil penyampai ilmu agama kepada masyarakat.

Akan tetapi, bukan berarti metode sorogan dan bandongan tidak memiliki kebaikan sama sekali. Ada hal-hal tertentu yang dirasakan

perkembangan pendidikan di lingkungannya. Proses adaptasi akan terus berlangsung. Kehadiran lembaga madrasah dan bahkan lembaga pendidikan yang mengikuti jalur Departemen Pendidikan Nasional seperti SLTP dan SMU jelas bisa memperkokoh usaha-usaha adaptasi metodik ini. Penyerapan terhadap metode-metode baru semakin bertambah untuk diujicobakan dalam pendidikan pesantren. Pengendali politik pendidikan pesantren ini benar-benar menyadari keprihatinan Zaeni maupun Wahid tentang kelemahan metodik pendidikannya dan berupaya mengadakan pembaharuan.

Penyerapan metode baru sebagai tambahan terhadap metode yang bersifat tradisional tidak pernah seragam. Para peneliti menemukan perbedaan pemakaian metode di kalangan pesantren. Dhofier merinci atas metode sorogan, bandongan (wetonan), musyawarah (seminar), tanya jawab, dan metode diskusi.²⁴ Sindu Galba menyebut metode sorogan, sorogan klasikal, bandongan, ceramah, dan metode latihan tulis-baca.²⁵ Rincian metode yang berbeda ini sebagai akibat kecenderungan kiai sebagai refleksi otonominya. Oleh karena itu, pengamatan terhadap pesantren yang berbeda akan menemukan penerapan metode yang berlainan pula.

Pembagian metode yang sederhana tersebut merupakan hasil pengamatan sepintas. Observasi yang cermat terhadap pelaksanaan proses belajar-mengajar di pesantren akan menemukan perubahan bentuk metode pendidikan yang amat beragam baik yang sering diterapkan maupun terbatas pada saat-saat tertentu. Keragamaan ini mungkin tidak kurang dari jumlah metode pendidikan yang ditempuh lembaga-lembaga pendidikan formal, seperti SD, SLTP dan SMU. Variasi metode ini membuktikan bahwa pesantren telah mengadakan penyesuaian secara serius melalui penambahan secara horizontal, sehingga makin melunturkan batas-batasnya dengan sistem pengajaran model Barat. Pimpinan-pimpinan pesantren yang tergabung dalam Rabithat Ma'âhid telah mempraktekkan metode-metode yang sangat beragam, kemudian mereka menetapkannya dalam muktamar ke-1 pada 1959, yang meliputi: metode tanya jawab, diskusi, imla', muthala'ah/recital, proyek, dialog, karyawisata, hafalan/verbalisme,



Pesantren

Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi

Buku ini berusaha memberikan gambaran yang utuh tentang pesantren. Gambaran yang utuh seperti itu sangat diperlukan agar penilaian klise yang selalu mengkategorikan pesantren sebagai lembaga tradisional yang tidak pernah disentuh oleh proses perubahan yang dinamis bisa dihindari. Penulis buku ini menemukan sebuah dinamika yang halus namun pasti terjadi pada institusi pesantren. Dinamika seperti itu, selalu muncul akibat dari kemampuan pesantren dalam menjalin hubungan interactive dengan nilai-nilai yang hidup di sekitarnya. Hubungan timbal balik tersebut kemudian melahirkan perubahan dan penyesuaian dalam tubuh pesantren, hingga akhirnya lembaga yang sudah ada sejak ratusan tahun ini bisa tetap hidup dan menghidupi masyarakat di sekitarnya sampai era modern pada saat ini.

"Saya yakin, bahwa kajian pesantren yang dipersembahkan oleh saudara Mujamil Qomar ini akan bisa memberikan perspektif baru tentang dunia pesantren kepada sidang pembaca."

> -Dr. Thoha Hamim, M.A., Pembantu Rektor I IAIN Sunan Ampel, Surabaya

Buku ini layak dibaca oleh para mahasiswa, peneliti, dosen, cendekiawan, dan mereka-mereka yang menekuni serta berminat mengetahui tentang pesantren.



PENERBIT ERLANGGA

Jl. H. Baping Raya No. 100 Ciracas, Jakarta 13740 E-mail: editor@erlangga.net Website: www.erlangga.co.id

